BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat bagitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Selain itu ada hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga Negara dalam memenuhi kewajibannya pada Negara, dan Negara kepada masyarakatnya.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi Negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah selaku pihak menjalankan menyelenggarakan atau fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya seperti disinggung sebelumnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai kewajibannya tersebut.dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan pajak darin rakyatnya. Pajak juga merupakan suati gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.

Banyak para ahli pemikir di beberpa Negara yang memperhatikan masalah-masalah pemungutan pajak oleh penerintah.Di samping itu juga memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran bagi kemajuan pemerintah suatu Negara, hal ini adalah dari sector penerimaan pajak. Pajak adalah kawajiban rakyat sebagai warga Negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui

bahwa pajak merupakan beban berat yang harus dipikul rakyat suatu Negara. Karena merupakan beban pengorbanan yang dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra.

Kini Sistem pemotongan pajak di Indonesia khususnya pajak penghasilan pph 21 berdasarkan self assesment.system Dalam system tersebut wajib pajak di beri wewenang untuk menyetor, melapor dan menghitung pajaknya sendiri. Pph pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pajak orang peribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Kata “diperoleh” manujukan bahwa walaupun penghasilan tersebut belum diterima uangnya, tetapi sudah merupakan hak wajib pajak pajak yang bersangkutan maka sudah seharusnya dilakukan pemotongan pajak.

Salah satu yang diterapkan di Indonesia yang sudah sangat terkenal oleh masyarakat banyak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan kepada konsumen terhadap setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa Kena Pajak (JKP), seperti barang yang di supermarket, makanan siap saji, produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan yang sudah terdaftar di pemerintah terkait PPN semata-,ata mengandung pengertian sebagai suatu cara pemungutan pajak dari pada jenis pajak, PPN merupakan:

1. Pajak Tidak langsung (pajak yang bedanya dapat dialihkan kepada orang lain)
2. Pajak atas konsumsi dalam Negara

Dalam perkembangan sektor pajak, sebagaimana diketahui bahwa penerimaan Negara semakin tahun semakin tergantung dari penerimaan sektor pajak. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah melakukan kewajiban membayar pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang dominan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya belum tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban interimnya yaitu dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa yang masih sering menunggak. Selain itu, wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban tahunan yaitu menghitung pajak atas dasar sistem self assessment yaitu wajib pajak melaporkan perhitungan nilai pajaknya lebih kecil daripada yang sebenarnya dalam SPT pada akhir tahun pajak serta ada juga wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

Untuk itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak patuh dan seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi wajib pajak yang patuh. Permasalah kepatuhan disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil, prosedur perpajakan yang terlalu komplek, serta adanya peraturan yang kurang tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan menjadi timbulnya ketidakpatuhan dari diri wajib pajak untuk memperkecil permasalah yang timbul terhadap permasalahn tersebut maka salah satu upaya adalah melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga diharapkan dalam upaya tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak

. Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan penagihan.

penagihan memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

1. Serangkain Tindakan

   Maksudnya bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pada kantor lelang.

2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak

   Maksudnva adalah juru sita pajak negara yang telah memenuhi svarat telah mendapatkan pendidikan khusus, diangkat serta disumpah terlebih dahulu.

3. Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP/SKP/SKPT.

4. Menurut Undang-undang Perpajakan ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis mengenai prosedur pelaksanaan penagihan pajak PPh dan PPN pada KPP Pratama Majalaya Bandung dengan judul : “**PROSEDUR PENAGIHAN AKTIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJALAYA**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan kerja praktek ini adalah penulis ingin menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang perpajakan dan bagaimana menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kerja praktek ini, adalah

1. Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan penagihan pajak PPh dan PPN
2. Untuk mengetahui dampak dari Penagihan Pajak PPh dan PPN dan pengaruhnya dalam peningkatan pemungutan pajak di kpp Pratama Majalaya.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan dilaksanakannya kerja praktek yaitu:

1. **Bagi Penulis**

Menambah ilmu pengetahuan, Yang berkaitan dengan Prosedur Penagihan Aktif Pajak Penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai. Selain itu memantapkan mahasiswa untuk lebih berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mempraktekan ketrampilan yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

2. **Bagi Perusahaan**

Untuk Kantor pelayanan Pajak Pratama Majalaya bandung semoga hasil pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi,sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan menyempurnakan kegiatan dalam pelaksanaan Penagihan aktif Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.,

3. Bagi Pihak Lain

Menjadikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pelajaran serta pengalaman. Selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap laporan kerja praktek ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek dengan menggunakan metode Block Release, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Agar dapat tersusunnya laporan Kuliah Kerja Praktek ini tentunya sangat memerlukan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. ***Field Resea*rch (Penelitian Secara Langsung**)

1. Observasi langsung, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.
2. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

b. *Library Research* (Study Pustaka)

Study Literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memilih dan membaca berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan judul

laporan, di antaranya menggunakan berbagai buku, artikel maupun sumber-sumber lainnya yang sekiranya mampu memberikan informasi dan data yang butuhkan secara lengkap.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek dilakukan di KPP Pratama Bandung Tegalega yang berlokasi di Jl.Peta No 7 Bandung. Mulai tanggal 06 Juli-13 Agustus 2011, kegiatan kerja praktek dimulai pukul 08.00-16.30 pada hari Senin s.d Jum'at.

Table 1.1
Waktu pelaksanaan kerja praktek

No	**Prosedur Kegiatan**	**Bulan**						
1	**Tahap Persiapan**	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
	Mengambil surat izin kerja							
	Mencari tempat kerja Praktek							
	Menentukan tampat kerja praktek							
II	Tahap Pelaksanaan							
	Mengajukan surat permohonan izin							
	Meminta surat Pengantar perusahaan							
	Pengenalan tentang uraian tugas pada masing-masing seksi							
	Pelaksanaan Kerja Praktek							
III	Tahap 3							
	Menyiapkan laporan kerja praktek							
	Bimbingan Kuliah Kerja Praktek							
	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek							